

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PEMBENTUKAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Civic Education as a Vehicle for Fostering Ecological Citizenship in Sustainable Development

Submit Tgl.: 06-Oktober-2026

Diterima Tgl.: 07-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl.: 17-Oktober-2026

Aisyah Nanda Putri¹
Edoward Fran Silalahi²
Jessica Br Sinulingga³
Merci Naomi Exaudita
Pakpahan⁴
Samiullah Putra Limbong⁵
Sri Yunita⁶
Chandra Fhutu Neva^{7*}

^{1-7*}Universitas Negeri Medan,
Sumatera Utara

*email:

aisyahnandaputri78@gmail.com

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan warga negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui *ecological citizenship* atau kewarganegaraan ekologis yang menempatkan kepedulian, tanggung jawab, serta partisipasi terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan *ecological citizenship* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, serta sumber resmi yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk *ecological citizenship* melalui pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, keterampilan, serta partisipasi ekologis warga negara. Pembentukan *ecological citizenship* tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi lingkungan, tetapi perlu diwujudkan melalui pembelajaran kontekstual dan partisipatif seperti pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, *service learning*, diskusi isu lingkungan, serta kegiatan nyata di lingkungan sekitar. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi wahana untuk menghubungkan nilai kewarganegaraan dengan tindakan ekologis sehingga peserta didik mampu menjadi warga negara yang memiliki kesadaran, tanggung jawab, serta aktif berpartisipasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. mungkin.

Kata Kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan,
Ecological Citizenship, Partisipasi
Warga Negara, Pembangunan
Berkelanjutan

Keywords:

Civic Education, *Ecological Citizenship*,
Citizen Participation, Sustainable
Development

Abstract

Sustainable development requires citizen engagement to maintain a balance among social, economic, and environmental interests. One form of such engagement is "*ecological citizenship*," which integrates environmental concern, responsibility, and participation into the lives of citizens. This study aims to analyze the role of Civic Education as a vehicle for fostering *ecological citizenship* in support of sustainable development. A qualitative approach utilizing library research was employed. Data were gathered from scientific journals, academic books, conference proceedings, and official sources relevant to the research topic. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Civic Education plays a crucial role in shaping *ecological citizenship* by developing citizens' environmental knowledge, attitudes, values, skills, and participation. Fostering *ecological citizenship* cannot be achieved solely through the delivery of environmental content; it requires contextual and participatory learning approaches—such as problem-based learning, project-based learning, *service learning*, discussions on environmental issues, and tangible activities in the local environment. Thus, Civic Education can serve as a means to bridge civic values and ecological actions, enabling learners to become citizens who possess awareness and a sense of responsibility, and who actively participate in supporting sustainable development.

Cara mengutip Putri, A. N., Silalahi, E. F., Sinulingga, J. B., Pakpahan, M. N. E., Limbong, S. P., Yunita, S., & Neva, C. F. (2026). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan *Ecological Citizenship* dalam Pembangunan Berkelanjutan. *EduCurio: Education Curiosity*, 5(1), 349–360. <https://doi.org/10.71456/ecu.v5i1.2927>

PENDAHULUAN

Partisipasi warga negara merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam memahami persoalan, menyampaikan aspirasi, mengambil bagian dalam pelaksanaan, serta mengawasi proses pembangunan. Warga negara perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap perubahan di lingkungannya. Wadu, Ladamay, dan (Wadu et al., 2020) menunjukkan bahwa keterlibatan warga negara dapat menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan melalui aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan (Supandi & Saliman, 2025). menunjukkan bahwa penguatan kapasitas warga dan kelembagaan lokal dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan warga yang tidak berhenti pada penerimaan manfaat pembangunan, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengambil peran dalam prosesnya.

Partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan pada dasarnya tidak cukup dipahami sebagai keikutsertaan warga dalam suatu kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Partisipasi yang bermakna mencakup keterlibatan dalam mengenali persoalan, menyampaikan kebutuhan dan gagasan, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, melaksanakan kegiatan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Bentuk keterlibatan semacam ini memberikan ruang bagi warga untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan persoalan bersama. Karena itu, kualitas partisipasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang terlibat, tetapi juga oleh sejauh mana warga memiliki kesempatan untuk berperan, mengambil tanggung jawab, dan berkontribusi terhadap hasil pembangunan. Perspektif tersebut penting karena

pembangunan berkelanjutan pada akhirnya membutuhkan perubahan yang dapat dipertahankan melalui keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu bidang pembangunan yang sangat membutuhkan partisipasi warga negara adalah lingkungan hidup. Persoalan sampah, pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim memiliki dampak yang tidak terbatas pada individu tertentu sehingga penanganannya membutuhkan tindakan bersama. Partisipasi ekologis dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, pengurangan penggunaan sumber daya secara berlebihan, kampanye lingkungan, maupun keterlibatan dalam kegiatan komunitas. (Ambarita et al., 2024) menunjukkan bahwa kegiatan komunitas yang melibatkan penanaman pohon, kampanye daur ulang, konseling lingkungan, diskusi, dan proyek kolaboratif dapat memperkuat kesadaran ekologis sekaligus keterlibatan warga dalam upaya keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan bentuk partisipasi yang menghubungkan kepedulian terhadap lingkungan dengan tanggung jawab warga negara.

Hubungan antara tanggung jawab warga negara dan lingkungan kemudian dapat dipahami melalui konsep *ecological citizenship* atau kewarganegaraan ekologis. Konsep ini memperluas makna kewarganegaraan dengan menempatkan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Warga negara tidak hanya memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang baik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap lingkungan, masyarakat lain, dan generasi mendatang. (Usmi & Murdiono, 2021) menunjukkan bahwa *ecological citizenship* dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter warga negara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. (Santoso et al., 2024) juga menempatkan

Pendidikan Kewarganegaraan ekologis sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, *ecological citizenship* dapat dipahami sebagai bentuk kewarganegaraan yang memberikan dimensi ekologis pada tanggung jawab dan partisipasi warga negara.

Ecological citizenship menjadi penting karena kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup berhenti pada pengetahuan atau sikap individual. Kesadaran ekologis perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang memiliki dampak terhadap kehidupan bersama. Dalam penelitian (Ambarita et al., 2024), keterlibatan dalam kegiatan lingkungan, diskusi, pelatihan, dan proyek kolaboratif tidak hanya memperluas pemahaman mengenai persoalan ekologis, tetapi juga mendorong anggota komunitas untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari tindakan mereka dan berkontribusi dalam upaya kolektif. Dengan demikian, *ecological citizenship* memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi warga negara: kesadaran ekologis menjadi dasar, sedangkan tindakan dan keterlibatan sosial menjadi bentuk konkretnya. Perspektif ini menjadikan lingkungan bukan sekadar objek yang harus dilindungi, tetapi juga ruang tempat warga negara menjalankan tanggung jawab kewarganegaraannya.

Dalam proses pembentukan warga negara yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab ekologis, pendidikan memiliki posisi strategis. Pendidikan dapat membangun pengetahuan sekaligus memberikan pengalaman yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan terhadap persoalan nyata. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi khusus karena pembelajarannya berkaitan dengan pembentukan pengetahuan, keterampilan, sikap, tanggung jawab, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, isu lingkungan dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kepedulian, keadilan, kepentingan bersama, dan partisipasi. Dalam posisi tersebut,

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menyampaikan konsep mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga dapat menyediakan ruang untuk membangun praktik kewarganegaraan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Namun, penguatan *ecological citizenship* dalam Pendidikan Kewarganegaraan masih menghadapi persoalan. menemukan bahwa buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan menengah belum memiliki materi yang secara khusus dan terfokus membahas *ecological citizenship*; materi lingkungan masih banyak hadir dalam bentuk uraian singkat dan belum dikembangkan sebagai kompetensi ekologis yang utuh. Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi isu lingkungan dalam PKn tidak cukup dilakukan dengan menambahkan materi tentang lingkungan. Pembelajaran perlu menghubungkan persoalan ekologis dengan nilai, keterampilan, dan tindakan kewarganegaraan agar peserta didik memahami lingkungan sebagai persoalan publik yang membutuhkan keterlibatan bersama. Dengan demikian, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Kebutuhan tersebut semakin relevan pada pendidikan tinggi karena mahasiswa merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kapasitas akademik dan sosial untuk terlibat dalam persoalan publik, termasuk persoalan lingkungan. Penelitian (Faried Irfany et al., 2024) di Universitas Negeri Surabaya menunjukkan bahwa *ecological citizenship* dalam lingkungan perguruan tinggi masih belum optimal dan bahwa Pendidikan Pancasila dapat menjadi salah satu ruang untuk membudayakan *ecological citizenship* menuju *sustainable campus*. Penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya tantangan pada aspek kebijakan institusi, peran dosen, dan kesadaran mahasiswa. Temuan ini memperlihatkan bahwa perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi tempat penyampaian pengetahuan tentang keberlanjutan, tetapi juga perlu menjadi lingkungan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk

mengalami, mempraktikkan, dan mengembangkan partisipasi ekologis.

Kajian terbaru semakin memperkuat kebutuhan tersebut. (Hardian et al., 2024) menjelaskan bahwa integrasi *Education for Sustainable Development* dengan *ecological citizenship* dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan ekologis generasi muda. Kajian tersebut menekankan pentingnya pembelajaran yang kontekstual, penyelidikan terhadap persoalan sosial-ekologis, berpikir kritis, serta partisipasi yang berkelanjutan. Sementara itu, (Dwi Pratiwi et al., 2026) melalui kajian lintas penelitian menemukan bahwa perspektif pedagogis dalam studi masih relatif kurang dibandingkan kajian yang berfokus pada lingkungan, politik, dan kebijakan pembangunan. Temuan tersebut membuka ruang untuk memperkuat kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang yang secara khusus mengembangkan kompetensi ekologis sekaligus partisipasi warga negara *ecological citizenship*.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis keberlanjutan dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran *ecological citizenship*. (Sopianingsih et al., 2026), misalnya, mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis *civic sustainability* dan menemukan hubungan positif antara penerapan model tersebut dengan kesadaran *green citizenship* mahasiswa. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa konsep keberlanjutan dapat diintegrasikan dengan pembelajaran kewarganegaraan melalui pendekatan berbasis proyek, media digital, dan penilaian autentik. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pembentukan *ecological citizenship* membutuhkan proses pendidikan yang memberi pengalaman kepada peserta didik untuk menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan persoalan lingkungan dan tindakan nyata.

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, terdapat hubungan yang erat antara partisipasi warga negara, *ecological citizenship*, pembangunan

berkelanjutan, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya keterlibatan warga dalam pembangunan berkelanjutan, menjelaskan *ecological citizenship* sebagai bentuk tanggung jawab ekologis, serta menunjukkan potensi pendidikan untuk membangun kesadaran dan tindakan lingkungan. Akan tetapi, masih terdapat ruang untuk mengkaji secara lebih terarah bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai wahana yang menghubungkan pengetahuan dan nilai kewarganegaraan dengan partisipasi ekologis sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menempatkan *ecological citizenship* sebagai materi pembelajaran, tetapi memandangnya sebagai proses pembentukan warga negara yang mampu memahami persoalan ekologis, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, dan berpartisipasi dalam tindakan yang mendukung keberlanjutan. Atas dasar itu, penelitian ini berfokus pada “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan *Ecological Citizenship* dalam Pembangunan Berkelanjutan” untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi ekologis warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama, seperti buku, artikel jurnal, dokumen ilmiah, dan publikasi resmi untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk *ecological citizenship* dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Abdullah et al., 2024).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku akademik, prosiding, serta website

resmi pemerintah dan lembaga pendidikan yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan tiga kriteria, yaitu relevansi dengan tema penelitian, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi sehingga data yang dianalisis memiliki validitas ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, ecological citizenship, partisipasi warga negara, dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh data kemudian diklasifikasikan sesuai tema untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan tema-tema kajian, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap keterkaitan konsep dan temuan dari berbagai literatur (Anggraini, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Ecological Citizenship* dalam Pembangunan Berkelanjutan

Ecological citizenship atau kewarganegaraan ekologis merupakan konsep yang menempatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan warga negara. Warga negara tidak hanya memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui perilaku sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, menghemat sumber daya, menjaga kebersihan lingkungan, serta terlibat

dalam kegiatan yang mendukung kelestarian alam. (Nurdiansyah & Komalasari, 2023).

Permasalahan lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat karena kerusakan lingkungan dapat memengaruhi kesehatan, kesejahteraan, keamanan, dan kualitas hidup. Kondisi tersebut membutuhkan warga negara yang memiliki kesadaran terhadap dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan. Kesadaran ekologis tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami permasalahan lingkungan, tetapi juga mendorong seseorang untuk memiliki sikap bertanggung jawab dan bersedia melakukan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam apabila tidak disertai dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Ecological citizenship memberikan ruang bagi warga negara untuk ikut menjaga keseimbangan tersebut melalui perilaku yang ramah lingkungan, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. (Santoso et al., 2024).

Pembentukan ecological citizenship tidak cukup melalui pemberian pengetahuan mengenai lingkungan. Pengetahuan perlu dikembangkan menjadi sikap, nilai, dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab ekologis. Warga negara perlu memiliki kemampuan untuk mengenali persoalan lingkungan, memahami penyebab dan dampaknya, menentukan sikap terhadap persoalan tersebut, serta mengambil bagian dalam penyelesaian masalah lingkungan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang public (Hardian et al., 2024).

Ecological citizenship juga berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam menjaga kepentingan lingkungan bersama. Partisipasi dapat dilakukan melalui



kegiatan pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi dan air, perlindungan lingkungan sekitar, kegiatan komunitas, maupun keterlibatan dalam menyampaikan aspirasi mengenai persoalan lingkungan. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara (Dwi Pratiwi et al., 2026).

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, *ecological citizenship* dapat ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kompetensi warga negara. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa lingkungan merupakan bagian dari kehidupan bersama yang harus dijaga melalui kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi. Nilai gotong royong, tanggung jawab, kepedulian, keadilan, dan penghormatan terhadap hak generasi mendatang dapat menjadi landasan dalam membentuk warga negara yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.

B. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan *Ecological Citizenship*

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang untuk mengembangkan kesadaran ekologis karena PKn tidak hanya berorientasi pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Persoalan lingkungan dapat ditempatkan sebagai bagian dari persoalan kewarganegaraan karena kondisi lingkungan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Peserta didik perlu memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara (Kasmawati, 2023).

Materi Pendidikan Kewarganegaraan dapat menghubungkan nilai tanggung jawab, kepedulian, gotong royong, keadilan, dan partisipasi dengan persoalan lingkungan. Dalam Usmi (2021) menunjukkan bahwa konsep *ecological citizenship* dapat diintegrasikan dalam materi Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan sehingga peserta didik memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara kewarganegaraan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Integrasi tersebut membantu peserta didik melihat persoalan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kepentingan bersama.

Pembentukan *ecological citizenship* melalui PKn perlu mencakup pengetahuan, sikap, dan tindakan. Peserta didik perlu memahami berbagai persoalan lingkungan, memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam, serta mampu menerapkan kepedulian tersebut melalui perilaku nyata. Nurdiansyah (2023) menempatkan pendidikan lingkungan dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam membentuk kewarganegaraan ekologis karena kesadaran lingkungan perlu berkembang menjadi tindakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran PKn dapat diarahkan pada kegiatan yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik dalam menghadapi persoalan lingkungan. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, penghematan energi, pemanfaatan barang bekas, dan kebersihan lingkungan dapat dikaitkan dengan materi kewarganegaraan. Artina (2024) menekankan pentingnya pendekatan pedagogis dan skema pembelajaran yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kepedulian ekologis melalui pengalaman dan keterlibatan secara langsung. (Artina & Amin, 2024).

Persoalan lingkungan juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami masalah publik. Peserta didik dapat diajak mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitarnya, memahami penyebab dan dampaknya, mengidentifikasi pihak yang berkaitan, serta mendiskusikan solusi yang dapat dilakukan bersama. Santoso (2024) mengaitkan Pendidikan Kewarganegaraan ekologis dengan pembangunan berkelanjutan karena warga negara memiliki peran

dalam menjaga lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pembentukan *ecological citizenship* tidak hanya berlangsung melalui pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga melalui budaya sekolah dan pengalaman peserta didik dalam lingkungan sosial. Pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, menjaga fasilitas umum, serta mengikuti kegiatan lingkungan dapat menjadi bagian dari praktik kewarganegaraan ekologis. Lingkungan sekolah dapat menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan ekologis sekaligus memahami hubungan antara perilaku individu dan kepentingan bersama. (Nurdiansyah & Komalasari, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan ekologis. Pratiwi (2026) menghubungkan *ecological citizenship* dengan pencapaian SDGs melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan yang mendorong kesadaran lingkungan, partisipasi, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan. Posisi tersebut menjadikan PKn tidak hanya sebagai pembelajaran mengenai kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai wahana pembentukan warga negara yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

C. Pembentukan Kompetensi Ekologis melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pembentukan *ecological citizenship* dalam Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi yang memungkinkan peserta didik memahami, menyikapi, dan terlibat dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Kompetensi ekologis tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai lingkungan, tetapi juga mencakup sikap dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Nurdiansyah (2023), pembentukan kewarganegaraan ekologis

berkaitan dengan proses pendidikan yang mampu menghubungkan pemahaman lingkungan dengan keterlibatan warga dalam kehidupan masyarakat.

1. Pengetahuan Ekologis

Pengetahuan ekologis berkaitan dengan kemampuan peserta didik memahami kondisi dan permasalahan lingkungan di sekitarnya. Materi PKn dapat mengaitkan persoalan seperti pencemaran, sampah, perubahan iklim, kerusakan ekosistem, penggunaan sumber daya alam, dan pembangunan dengan kehidupan warga negara. Pemahaman tersebut membantu peserta didik melihat bahwa permasalahan lingkungan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat dan membutuhkan tanggung jawab bersama. Usmi (2021) menunjukkan bahwa muatan *ecological citizenship* dapat dikembangkan melalui materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga persoalan lingkungan menjadi bagian dari pemahaman peserta didik mengenai kehidupan kewarganegaraan (Usmi & Murdiono, 2021).

Pengetahuan ekologis juga mencakup kemampuan memahami hubungan antara tindakan manusia dengan perubahan kondisi lingkungan. Peserta didik dapat diajak menganalisis penyebab suatu masalah lingkungan, pihak yang terdampak, serta konsekuensi sosial yang muncul. Pembelajaran seperti ini membuat pengetahuan lingkungan tidak berhenti pada hafalan, tetapi berkembang menjadi kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan publik.

2. Sikap dan Karakter Ekologis

Sikap ekologis berkaitan dengan kepedulian, tanggung jawab, disiplin, kesadaran, dan penghargaan terhadap lingkungan. Nilai tersebut dapat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan karena PKn memiliki fungsi dalam membentuk karakter peserta didik sebagai warga negara. Kasmawati (2023) mengaitkan kewarganegaraan ekologis dengan pembentukan kesadaran dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan bersama (Kasmawati, 2023).



Sikap ekologis dapat terlihat melalui kebiasaan sederhana, seperti menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik, menghemat air dan energi, serta menjaga fasilitas umum. Pembiasaan tersebut menjadi penting karena kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan dalam perilaku yang dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui pemahaman terhadap materi lingkungan.

3. Keterampilan dan Partisipasi Ekologis

Keterampilan ekologis berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan sikap yang dimiliki dalam menghadapi persoalan lingkungan. Peserta didik dapat dilatih mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyampaikan pendapat, berdiskusi, bekerja sama, dan menyusun solusi terhadap persoalan lingkungan. Dalam Artina (2024), pembelajaran kewarganegaraan yang memberikan pengalaman langsung dapat digunakan untuk mendorong keterlibatan peserta didik dalam membangun kewarganegaraan ekologis (Artina & Amin, 2024).

Partisipasi ekologis dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

1. Kegiatan pengelolaan sampah, misalnya pemilahan dan pengurangan sampah.
2. Penghijauan lingkungan, seperti penanaman dan pemeliharaan tanaman.
3. Penghematan sumber daya, terutama air dan energi.
4. Kegiatan sosial lingkungan, melalui kerja bakti atau komunitas lingkungan.
5. Penyampaian aspirasi, yaitu menyampaikan pendapat mengenai persoalan atau kebijakan lingkungan.
6. Proyek lingkungan di sekolah, dengan melibatkan peserta didik dalam mencari dan menyelesaikan masalah lingkungan di sekitarnya.

Dalam Santoso (2024), partisipasi warga negara menjadi bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan ekologis karena keberlanjutan

lingkungan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Peserta didik yang terbiasa terlibat dalam kegiatan lingkungan memiliki ruang untuk mengembangkan tanggung jawab sosial sekaligus memahami bahwa penyelesaian persoalan lingkungan merupakan kepentingan bersama.

Pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ekologis membentuk kompetensi warga negara yang lebih utuh. Peserta didik tidak hanya mengetahui permasalahan lingkungan, tetapi juga memiliki kepedulian dan kemampuan untuk mengambil tindakan. Pratiwi (2026) mengaitkan penguatan *ecological citizenship* dalam pendidikan kewarganegaraan dengan partisipasi warga negara dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dan SDGs.

D. Strategi Pembelajaran PKn dalam Membentuk Ecological Citizenship

Pembentukan *ecological citizenship* membutuhkan pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan konsep lingkungan, tetapi juga memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk memahami dan menghadapi persoalan lingkungan. Pembelajaran PKn dapat menghubungkan materi kewarganegaraan dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar sehingga peserta didik mampu melihat hubungan antara perilaku warga negara, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

I. Pembelajaran Berbasis Masalah

Pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dengan mengangkat persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti sampah, pencemaran sungai, penggunaan plastik, banjir, atau berkurangnya ruang terbuka hijau. Peserta didik dapat diminta mengidentifikasi masalah, mencari penyebab, mengetahui pihak yang terdampak, serta mendiskusikan alternatif penyelesaian. Proses tersebut melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus membangun kepedulian terhadap persoalan publik.

2. Pembelajaran Berbasis Proyek

Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menghasilkan tindakan nyata terhadap persoalan lingkungan. Proyek dapat berupa pengelolaan sampah sekolah, pembuatan kampanye lingkungan, penghijauan, pemanfaatan barang bekas, atau gerakan pengurangan plastik sekali pakai. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelompok sehingga nilai kerja sama, tanggung jawab, dan gotong royong berkembang bersamaan dengan kepedulian ekologis.

3. Service Learning

Service learning menghubungkan pembelajaran dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Peserta didik dapat terlibat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, penanaman pohon, pengelolaan sampah bersama masyarakat, atau kegiatan edukasi mengenai lingkungan. Pengalaman tersebut memberikan kesempatan untuk menerapkan nilai kewarganegaraan secara langsung sekaligus memahami persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

4. Diskusi dan Kajian Isu Lingkungan

Isu lingkungan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dalam pembelajaran PKn. Peserta didik dapat membahas persoalan perubahan iklim, pencemaran, pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, penggunaan sumber daya alam, dan kebijakan lingkungan. Diskusi dapat diarahkan pada pertanyaan mengenai hak masyarakat terhadap lingkungan, kewajiban warga negara, peran pemerintah, serta bentuk partisipasi masyarakat. Cara ini membantu peserta didik memahami bahwa persoalan lingkungan juga berkaitan dengan kebijakan publik dan kehidupan demokratis.

5. Project Citizen Berbasis Lingkungan

Model Project Citizen dapat dikembangkan dengan menjadikan persoalan lingkungan sebagai masalah kebijakan publik. Peserta didik dapat melakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah lingkungan di sekitar.

2. Mengumpulkan informasi dan data mengenai masalah tersebut.
3. Mengidentifikasi kebijakan yang berkaitan dengan masalah.
4. Menyusun beberapa alternatif solusi.
5. Menentukan alternatif yang dianggap sesuai berdasarkan hasil kajian.
6. Menyusun bentuk penyampaian atau advokasi kepada pihak terkait.

Kegiatan tersebut memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif dalam menghadapi persoalan publik.

6. Pemanfaatan Lingkungan Sekolah sebagai Sumber Belajar

Lingkungan sekolah dapat menjadi ruang praktik ecological citizenship. Peserta didik dapat dilibatkan dalam pengamatan kondisi kebersihan, penggunaan air dan listrik, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan ruang hijau. Hasil pengamatan kemudian dikaitkan dengan materi PKn mengenai tanggung jawab, partisipasi, gotong royong, kepentingan umum, dan pembangunan berkelanjutan. Usmi (2021) menempatkan materi dan pengalaman kewarganegaraan sebagai ruang yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran ekologis peserta didik.

Strategi pembelajaran tersebut menempatkan peserta didik sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan ecological citizenship. Pembelajaran tidak berhenti pada pemahaman mengenai pentingnya menjaga lingkungan, tetapi memberikan kesempatan untuk berpikir, berdiskusi, bekerja sama, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan nyata. Artina (2024) menguatkan pentingnya pengalaman belajar yang dapat menghubungkan pendidikan kewarganegaraan dengan tindakan ekologis dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penerapan Ecological Citizenship melalui Partisipasi Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan *ecological citizenship* merupakan kelanjutan dari proses pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ekologis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah peserta didik memahami persoalan lingkungan dan memperoleh pengalaman melalui berbagai strategi pembelajaran, pengetahuan tersebut perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Nurdiansyah (2023) mengaitkan pembentukan kewarganegaraan ekologis dengan keterlibatan dalam kegiatan lingkungan sehingga pendidikan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berkembang menjadi partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi warga negara dalam menjaga lingkungan dapat dilakukan melalui tindakan sederhana maupun kegiatan bersama. Tindakan tersebut meliputi mengurangi dan memilah sampah, menghemat air dan energi, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, serta merawat fasilitas umum. Kegiatan bersama dapat berupa kerja bakti, pengelolaan sampah, komunitas lingkungan, kampanye ekologis, dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Santoso (2024) menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam membangun kewarganegaraan ekologis yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Penerapan *ecological citizenship* juga dapat dilakukan melalui keterlibatan warga negara dalam persoalan dan kebijakan lingkungan. Warga negara dapat menyampaikan aspirasi, mengikuti forum masyarakat, memberikan gagasan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta ikut mencari solusi terhadap masalah lingkungan di daerahnya. Bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan ekologis tidak hanya berkaitan dengan perilaku menjaga lingkungan secara individu, tetapi juga kemampuan warga negara untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan publik.

Dalam lingkungan sekolah, penerapan *ecological citizenship* dapat diwujudkan melalui proyek dan kegiatan yang melibatkan peserta didik secara langsung. Program pemilahan sampah, penghijauan sekolah,

penghematan listrik dan air, pemanfaatan barang bekas, serta kampanye lingkungan dapat menjadi ruang praktik bagi peserta didik. Usmi (2021) menunjukkan bahwa unsur *ecological citizenship* dapat diintegrasikan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga kegiatan sekolah dapat dikaitkan dengan nilai tanggung jawab, kepedulian, dan partisipasi sebagai warga negara. Penerapan tersebut juga dapat diperluas melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Peserta didik dapat menerapkan kebiasaan ekologis di rumah dan mengajak anggota keluarga untuk mengurangi sampah, menghemat sumber daya, serta menjaga kebersihan lingkungan. Di masyarakat, keterlibatan dapat dilakukan melalui kerja bakti, kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, maupun kegiatan komunitas. Artina (2024) menekankan pentingnya pengalaman belajar yang menghubungkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan tindakan nyata sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk menerapkan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Ecological citizenship juga memiliki hubungan dengan pembangunan berkelanjutan karena tindakan warga negara dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan, kesehatan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, serta perlindungan ekosistem. Pratiwi (2026) menghubungkan pendidikan kewarganegaraan ekologis dengan agenda SDGs melalui penguatan kesadaran, partisipasi, aksi sosial, dan pemanfaatan ruang digital. Peserta didik dapat menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi, membuat kampanye lingkungan, mendokumentasikan kegiatan, dan mengajak masyarakat melakukan tindakan ekologis.

Penerapan *ecological citizenship* masih menghadapi tantangan berupa rendahnya konsistensi perilaku, kurangnya fasilitas pendukung, serta kecenderungan pembelajaran lingkungan yang berhenti pada pengetahuan. Penguatan perlu dilakukan melalui pembiasaan, pengalaman langsung, dukungan sekolah,

keluarga, masyarakat, dan pemanfaatan teknologi secara positif. Artina (2024) menempatkan pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif sebagai bagian penting dalam mengembangkan kewarganegaraan ekologis.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi penting dalam menghubungkan pembelajaran dengan partisipasi nyata. Peserta didik yang memperoleh pengetahuan ekologis, memiliki karakter peduli lingkungan, menguasai keterampilan berpikir kritis, dan memperoleh pengalaman langsung memiliki ruang untuk berkembang menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Proses tersebut membuat ecological citizenship tidak hanya menjadi konsep dalam pembelajaran, tetapi menjadi bagian dari praktik kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai wahana pembentukan ecological citizenship dalam pembangunan berkelanjutan. Ecological citizenship tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai lingkungan, tetapi juga mencakup kesadaran, sikap, tanggung jawab, serta tindakan nyata warga negara dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, persoalan lingkungan perlu dipandang sebagai bagian dari persoalan kewarganegaraan karena memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pembentukan ecological citizenship melalui Pendidikan Kewarganegaraan perlu dilakukan secara kontekstual dan partisipatif. Pembelajaran dapat menghubungkan materi kewarganegaraan dengan persoalan lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik melalui pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, service learning, diskusi isu lingkungan, serta kegiatan lingkungan secara langsung. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama, mengambil

keputusan, bertanggung jawab, serta terlibat dalam penyelesaian persoalan lingkungan. Penerapan ecological citizenship juga perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan seperti mengurangi dan memilah sampah, menghemat air dan energi, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, mengikuti kegiatan komunitas, serta menyampaikan aspirasi mengenai persoalan lingkungan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga membentuk warga negara yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, F., Ilmu Al-Qur, D., Ma, an, & Aly Walindo dan Mahasiswa Program Doktor, had. (2024). AL-THIFL JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI. 1(1), 54.
- Ambarita, P. D. E., Darmawan, C., Rahmat, R., & Syaifullah, S. (2024). Citizenship and ecological education: Exploring the role of the Bakti Enzyme community in raising ecological awareness. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/jc.v2i1i2.76486>
- Anggraini, F. D. (2025). Peran Guru Sebagai Inovator Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pengkajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 8(1), 54–61. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.
- Artina, F., & Amin, M. (2024). Pendekatan Pedagogic dan Skema Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mempromosikan Kewarganegaraan Ekologi. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(3), 372–388. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i3.26431>
- Dwi Pratiwi, E., Anggraeni, L., & Wahyuni Tanshzil, S. (2026). Civic Education for the Planet: Cross-National Trends of Ecological Citizenship and Strategies for Advancing SDGs. 16(2), 709–726. <https://doi.org/10.23960/jpp>
- Faried Irfany, A., Usmi, R., Dwi Rianingsih, K., & Putri Rahmatia, A. (2024). Fostering Ecological Citizenship in Higher Education Through Pancasila Education as an Effort to Achieve a



- Sustainable Campus (Case Study at State University of Surabaya) Fostering Ecological Citizenship in Higher Education Through Pancasila Education as an Effort to Achieve a Sustainable Campus (Case Study at. 9(1), 48–57. <https://doi.org/10.26740/jcms.v9n1.p48-57>
- Hardian, M., Komalasari, K., Taufika, R., Fauzan, A., & Erlande, R. (2024). Conceptualizing the Convergence of Education for Sustainable Development and Ecological Citizenship: A Transformative Pedagogical Framework for Civic Education. *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial & Pendidikan*, 7(1), 2026. <https://doi.org/10.31002/j.kra.v7i1.3290>
- Kasmawati, A. (2023). Ecological Citizenship Discourse: A Critical Study of Citizenship Education in Indonesia. *Humaniora*, 14(1), 23–30. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v14i1.8016>
- Nurdiansyah, E., & Komalasari, K. (2023). Membentuk Kewarganegaraan Ekologis melalui Pendidikan Lingkungan berbasis Kegiatan Masyarakat. <https://doi.org/10.21009/plpb.v%vi%i.31844>
- Santoso, R., Opeska, Y., Khotimah, K., Sasi, W. A., & Utami, S. D. N. (2024). Pendidikan+Kewarganegaraan+Ekologis+Sebagai+Upaya+Pembangunan+Berkelanjutan+di+Indonesia (2). *Edia Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 8–15.
- Sopianingsih, P., Insani, N., Anggreani, N. D., Malika, S. A., & Evangelist, V. K. (2026). The effect of civic sustainability-based civic education learning models on students' awareness of green citizenship OPEN ACCESS. *Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 10(1), 73–82. <https://doi.org/10.21831/jk.v10i1.91653>
- Supandi, S., & Saliman, S. (2025). Enhancing citizen capacity through optimising Village Owned Enterprises (BUMDes) role in strengthening community participation for sustainable development. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v22i1.1335>
- Usmi, R., & Mardiono, M. (2021). Ecological citizenship in the textbook of Pancasila and Civic Education subjects at secondary level school. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 242–256. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.38885>
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Bandut, S. (2020). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Produksi Gula Aren. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 24. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.11476>